



INTISARI

Penelitian ini menilai proses implementasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan di Kalurahan Panggungharjo berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 100 Tahun 2020, yang bertujuan mengurangi kemiskinan melalui pembangunan dari pinggiran. Panggungharjo dipilih sebagai lokus karena termasuk kalurahan miskin dan Desa Mandiri Budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan BKK Dana Keistimewaan menggunakan tiga indikator dari Ripley & Franklin (1986) dan model implementasi dari Cheema & Rondinelli. Studi ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan data sekunder dari dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi BKK Dana Keistimewaan di Kalurahan Panggungharjo berjalan cukup efektif. Meskipun terjadi penurunan kemiskinan, tantangan utama terdapat pada perbaikan koordinasi antar lembaga dan peningkatan kapasitas pelaksana kebijakan. Kondisi lingkungan, yang didukung oleh kepemimpinan yang kuat serta distribusi kewenangan yang jelas, berperan penting dalam efektivitas kebijakan ini. Selain itu, sumber daya organisasi terbukti menjadi faktor krusial dalam mendukung keberhasilan kebijakan. Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dan kalurahan dalam mengelola BKK Dana Keistimewaan, terutama dalam memperkuat manajemen sumber daya dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Penguatan sinergi antar lembaga dan optimalisasi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini mampu terus berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di kawasan pinggiran.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Bantuan Keuangan Khusus (BKK), Dana Keistimewaan, Kalurahan Panggungharjo, Penurunan kemiskinan, Proses implementasi.



ABSTRACT

This study evaluates the implementation process of the Special Financial Assistance (BKK) Dana Keistimewaan in Kalurahan Panggungharjo, based on the Governor of DIY Regulation No. 100 of 2020, which aims to reduce poverty through development from the periphery. Panggungharjo was selected as the locus due to its classification as a poor village and a Desa Mandiri Budaya (Cultural Independent Village). The objective of this research is to assess the implementation of the BKK Dana Keistimewaan policy using the three indicators from Ripley & Franklin (1986) and the implementation model from Cheema & Rondinelli. The study employs primary data gathered through in-depth interviews and secondary data from related documents. Although poverty has decreased, the main challenges lie in improving inter-agency coordination and enhancing the capacity of policy implementers. The environmental conditions, supported by strong leadership and clear distribution of authority, have played a crucial role in the policy's effectiveness. Additionally, organizational resources have proven to be key factors in the success of this policy. The study offers practical recommendations for local governments and villages in managing BKK Dana Keistimewaan, particularly in strengthening resource management and increasing community engagement. Enhancing inter-agency synergy and optimizing the use of resources are necessary to ensure that this policy continues to contribute to poverty reduction and improved quality of life in peripheral areas.

Keywords: *Policy Implementation, Special Financial Assistance (BKK), Dana Keistimewaan, Kalurahan Panggungharjo, Poverty Reduction, Implementation Process.*